

PEMBERDAYAAN PERTANIAN MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DEMI TERCAPAINYA KETAHANAN PANGAN

Rahmat Fauzi*¹

RM Mahendradi

¹Universitas Tidar; Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116, Telp.
(0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

e-mail: *1rahmatroyaleclash@gmail.com

dadiem.mahendradi@untidar.ac.id

ABSTRACT

Adanya otonomi daerah pada era globalisasi mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat serta dapat memberdayakan masyarakat daerah khususnya dalam pertanian. Walaupun sektor pertanian dalam perkembangannya mengalami naik turun, namun pada sektor ini masih dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Potensi yang cukup besar masih dapat digali di sektor pertanian, baik berupa ketersediaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu contoh adanya pemberdayaan yaitu dapat diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis pola pemberdayaan pertanian yang tepat diterapkan melalui implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam masyarakat. Dengan adanya implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka diharapkan masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mendorong kemajuan daerahnya melalui pemberdayaan. Berkembangnya pertanian masyarakat akan berdampak terhadap pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi melalui pemberdayaan pertanian dalam program KUR, yang mana program ini menggunakan strategi yang efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan hasil produksi pertanian dan akan membuat ketersediaan pangan masyarakat Indonesia menjadi tercukupi serta pemerataan dan ketahanan pangan dapat dicapai.

Keywords : Pemberdayaan, pertanian, implementasi, ketahanan pangan

1. PENDAHULUAN

Penyebaran virus corona di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam menangani permasalahan Covid-19 tersebut. Kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya memberikan dampak kepada masyarakat. Adanya Covid-19 membuat perekonomian masyarakat semakin memburuk. Ditutupnya tempat pariwisata, pertokoan, hotel, dan tempat makan menunjukkan sulitnya kondisi perekonomian

masyarakat yang terdampak Covid-19. Bahkan, pekerja perusahaan swasta banyak yang diliburkan, dirumahkan, dan di PHK. Kondisi tersebut membuat masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Guna mendukung ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, maka diperlukan adanya produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani. Petani tersebut pastinya perlu diberdayakan agar pertanian masyarakat dapat berjalan lancar. Dengan

adanya pertanian masyarakat yang mampu memproduksi bahan pangan bagi seluruh masyarakat, maka ketahanan pangan dapat terwujud guna menghadapi musibah di masa yang akan datang seperti adanya virus Covid-19 saat ini.

Disamping itu, permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan di Indonesia yaitu kemiskinan. Adanya kemiskinan tersebut, membuat kualitas sumber daya manusia menjadi rendah. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab adanya kemiskinan. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya yaitu rendahnya tingkat kemampuan serta pengetahuan masyarakat, dan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah masih terbatas.

Agu dalam (Ajani, Mgbenka, Onah, 2015) menjelaskan bahwa kurangnya peluang, tantangan fisik, dan psikologis yang dihasilkan dari kemiskinan membuat banyak masyarakat menjadi pengangguran. Pengangguran dapat menimbulkan berbagai penyakit sosial seperti adanya tindak kriminal. Masalah-masalah yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan adanya pemberdayaan.

Pelaksanaan pemberdayaan dimulai dari sektor kecil terlebih dahulu kemudian meluas ke sektor yang lebih besar. Sektor kecil yang perlu diberdayakan saat ini yaitu

UMKM. Oleh karena itu, UMKM menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pengembangan usaha kecil dalam masyarakat masih mengalami berbagai permasalahan seperti permodalan dan pemasaran produk. Meskipun demikian, program pemberdayaan usaha kecil melalui aspek permodalan sudah ada sejak tahun 1970-an. Pemerintah pada saat itu sudah mengeluarkan berbagai program promosi yang secara langsung bertujuan membantu usaha kecil. Namun, dalam pelaksanaannya program pemberdayaan (promosi) usaha kecil ini kurang maksimal dan optimal.

Demi mengembangkan UMKM dalam masyarakat, maka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir sebagai solusi yang diciptakan oleh pemerintah guna membantu masyarakat dalam memperoleh permodalan. Akan tetapi masih terdapat masalah yang timbul dalam masyarakat, diantaranya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan program KUR tersebut dan kurangnya informasi atau ketidaktahuan masyarakat terhadap program KUR tersebut.

Adanya program KUR dari pemerintah maka diharapkan masyarakat dapat menciptakan ketahanan pangan. Namun, masih adanya sebagian masyarakat Indonesia

yang termasuk dalam kategori masyarakat tertinggal membuat kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber ekonomi (*resources*) menjadi sangat minim. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya adanya penyuluhan, bimbingan serta pendampingan dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan.

Salah satu penelitian yang membahas adanya pemberdayaan masyarakat melalui pertanian di era pandemi yaitu penelitian yang ditulis oleh (Harimurti & Erwandri, 2021) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Berwirausaha Produk Hasil Pertanian Di Masa Pandemi Covid 19”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pandemi Covid 19 berdampak paling kecil terhadap usaha pada sektor pertanian sehingga peluang wirausaha pada sektor pertanian masih besar. Di Kelurahan Teratai, kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagian besar wirausaha yang dimiliki warga adalah produk olahan hasil pertanian berupa makanan ringan seperti: aneka kue, keripik, roti dan masakan lauk-pauk. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan pengelolaan wirausaha, dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha serta pengelolaan

usaha dengan manajemen yang baik. Hasil survei menunjukkan bahwa 66,67% mengalami penurunan permintaan produk yang ditawarkan selama pandemi Covid 19 dan sebanyak 33,33% permintaan produk yang ditawarkan tetap sama dengan sebelum pandemi Covid-19. Penyebab penurunan permintaan diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perubahan perilaku konsumen, keterbatasan ruang gerak akibat pandemi covid 19 dan kurangnya pengetahuan teknologi untuk memasarkan produk.

Penelitian selanjutnya yang membahas pemberdayaan masyarakat melalui pertanian di era pandemi yaitu penelitian yang ditulis oleh (Suryanti, Umami, Firmansyah, & Widiasaputra, 2020) dengan judul “Pemberdayaan Pertanian Organik Dengan Model Hidrokanik Budikdamber Di Era Pandemi Covid – 19 Di Kabupaten Bantul Provinsi DIY”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Program Kemitraan Masyarakat (PKM) tentang pemberdayaan pertanian organik dengan model hidrokanik budikdamber untuk meningkatkan nilai tambah produksi pertanian dilaksanakan di Desa Wisata Tani Candran, Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Yogyakarta, pada bulan Januari sampai Juni 2020. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

dilaksanakan dengan melibatkan mitra Dasawisma Dahlia Desa Wisata Tani Candran. Anggota Dasawisma Dahlia selalu melibatkan perempuan secara langsung dalam sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan warga desa serta menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk berkunjung ke Museum Tani Jawa Desa Candran. Pada masa pandemi Covid-19, beberapa anggota dasawisma mencoba melakukan budikdamber, tetapi selalu mengalami kegagalan. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman terkait cara budidaya tanaman sayuran organik yang benar dengan memanfaatkan bahan baku yang ketersediaannya melimpah. Program pendampingan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknik budidaya tanaman sayuran secara organik dan teknik budikdamber, sehingga permasalahan yang dihadapi warga dalam melakukan budikdamber dapat diatasi. Setelah dilakukan pendampingan tingkat pengetahuan anggota dasawisma tentang budikdamber meningkat yang ditunjukkan melalui keberhasilan warga dalam mempraktikkan budikdamber.

Berdasarkan kedua penelitian diatas yang dapat dijadikan sebagai kajian literatur terdahulu dalam penelitian ini, maka dengan begitu penelitian ini dapat dinyatakan sebagai

suatu penelitian yang mempunyai kebaruan ilmiah. Adapun yang menjadi dasar kebaruan ilmiah dalam penelitian ini yaitu adanya kebaruan berupa relevansi bidang yang dikaji sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan masyarakat Indonesia saat ini dan menjadi suatu kajian ilmiah yang terbaru karena mengangkat tema pemberdayaan masyarakat melalui pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan di saat pandemi Covid-19 sedang marak di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat melalui masukan dan saran baik kepada pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Hal lain yang mendukung kebaruan ilmiah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilalui dengan proses metodologis yang sesuai serta bukan suatu pengulangan maupun penjiplakan dari penelitian sebelumnya. Di sisi lain, penelitian ini juga dilakukan dengan penuh kejujuran sehingga berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini dikategorikan sebagai suatu penelitian yang mempunyai kebaruan ilmiah.

Saat ini di Indonesia, pangan berkedudukan penting terutama makanan pokok karena menyangkut permasalahan

sosial, politik, budaya dan ekonomi. Makanan pokok penduduk sebagian besar berasal dari sereal yang terdiri dari beras, terigu, dan jagung. Selain itu, yang menjadi konsumsi terbesar sebagai makanan pokok penduduk adalah beras. Akan tetapi, Indonesia sendiri masih mengandalkan adanya beras impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, masalah ketahanan pangan di Indonesia menjadi penting guna menciptakan stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor unggulan masyarakat yang harus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia demi terciptanya ketahanan pangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi latar belakang adanya penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan digunakan yaitu bagaimana pola pemberdayaan pertanian yang tepat diterapkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan?. Adapun tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menganalisis pola pemberdayaan pertanian yang tepat diterapkan melalui implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui program

pemberdayaan pertanian masyarakat demi terwujudnya ketahanan pangan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data penelitian dalam bentuk uraian kalimat. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk membuat suatu kajian terkait perwujudan alur pikir Administrasi Pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo tahun 1990. Dalam skema alur pikir Administrasi Pembangunan oleh Bintoro Tjokroamidjojo tahun 1990 (dalam Anggara, 2016:28) tercermin bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial ekonomi, diperlukan upaya-upaya nyata melalui adanya fungsi dari administrasi pembangunan. Adapun fungsi pelaksanaan administrasi pembangunan menurut Bintoro Tjokroaminoto 1995 (dalam Anggara, 2016:162) yaitu (1) penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi pembangunan yang meliputi upaya

penyempurnaan organisasi serta pembinaan lembaga yang diperlukan kepegawaian dan kepengurusan sarana-sarana administrasi lainnya, (2) perumusan kebijaksanaan dan program pembangunan dalam berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif, dan (3) pencapaian tujuan-tujuan pembangunan oleh kegiatan pemerintahan dan partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan alur pikir tersebut dan teori-teori yang saya gunakan dalam landasan teori, maka diperlukan adanya landasan pemikiran yang digunakan untuk membuat suatu kajian. Berikut dibawah merupakan landasan pemikiran yang saya buat berdasarkan teori yang terdapat dalam landasan teori.

N o.	Program Pemberdayaan	Strategi	Aspek
1.	<i>Enabling</i> (menciptakan suasana yang memungkinkan)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi masyarakat ❖ Penyediaan fasilitas untuk mendukung keberlanjutan 	Pemerintah menyediakan fasilitas dalam pengembangan produk pertanian agar masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

		program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	demi mewujudkan ketahanan pangan
2.	<i>Empowering</i> (penguatan)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Desentralisasi dan kemandirian ❖ Peningkatan pelayanan pemerintah pusat ❖ Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian ❖ Pengembangan arah pemberdayaan melalui pentingnya agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peningkatan kemandirian pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk menyukseskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui peningkatan produksi pertanian. ❖ Pemberian pendidikan formal maupun non formal yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya seperti adanya penyuluhan secara berkala. ❖ Mengembangkan pertanian dan agroindustri atau industri yang

			mengolah hasil pertanian dan jasa-jasa yang menunjangnya
3.	<i>Protecting</i> (perlindungan)	❖Penyediaan fasilitator	Pemberian arahan dan mediasi untuk menggerakkan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui program KUR untuk meningkatkan usaha rakyat khususnya pada produk pertanian

Tabel 1. Landasan pemikiran penulis terkait program pemberdayaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi KUR di Indonesia

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien

dan efektif (Siagian S.P dalam Hardiyanti, 2019:213). Sementara itu, pengertian implementasi menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo dalam (Hardiyanti, 2011:214) adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.¹

Implementasi kebijakan menjadi suatu proses yang cukup rumit dan menyeluruh karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya berkaitan dengan karakteristik program kebijakan dan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemerintah (Hardiyanti, 2019:214).

Di sisi lain, menurut Hardiyanti (2019:214) program merupakan suatu rangkaian, langkah, prosedur, dan tindakan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana dalam suatu kurun waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Suatu program menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan.

George C. Edwards III (dalam Puryanto, 2019:73) berpendapat bahwa suatu implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat

¹ Hardiyanti, Abd Kadir Adys, Sudarmi. 2019. Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Jurnal Administrasi Publik. 5(2). 213-214.

berhasil. Menurut George C. Edwards III terdapat empat variabel yang terdapat dalam kebijakan publik diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena masing-masing komponen mempunyai suatu hubungan yang erat agar dapat meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri dikutip dari laman resmi kur.ekon.go.id, merupakan suatu program yang menjadi prioritas dalam menunjang adanya kebijakan pemberian kredit/pembiayaan yang ditujukan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk menganalisis implementasi program KUR di Indonesia, maka diperlukan adanya teori yang mendukung pembahasan terkait implementasi. Teori yang akan digunakan yaitu teori dari George C. Edwards III (dalam Puryanto, 2019:73). Menurut George C. Edwards III terdapat empat variabel yang terdapat dalam kebijakan publik diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut akan dianalisis apakah keempat variabel sudah dilaksanakan secara simultan dalam program KUR atau belum.

Struktur Birokrasi

IKU Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menargetkan bahwa pada tahun 2015, penyaluran program Kredit Usaha Rakyat akan mencapai sebesar Rp. 20 triliun. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.22,75 triliun (113,75%). Jumlah tersebut dicapai dalam kurun waktu empat bulan penyaluran KUR melalui 3 Bank BUMN. Bank BRI dalam penyaluran KUR menjadi bank dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi yaitu sebesar Rp.16,2 triliun.

Komunikasi dan Sikap

Pencapaian yang telah dicapai pada data diatas menunjukkan bahwa *output* kinerja dari pemerintah sudah tergolong baik karena berhasil mencapai bahkan melebihi target yang sudah direncanakan. Keberhasilan dalam mencapai target penyaluran KUR pastinya tidak terlepas dari kerjasama yang baik diantara berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran KUR. Laman resmi kur.ekon.go.id, menjelaskan bahwa pada tahun 2015, jumlah debitur yang menerima KUR mencapai 1.003.553 juta UMKM. Hal tersebut menjadi suatu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan terciptanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya pengangguran.

Dikutip dari laman resmi kur.ekon.go.id, program KUR dimanfaatkan guna meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran KUR pada tahun 2007-2014 total sebesar Rp.178,85 triliun dengan NPL sebesar 3,3%. Yang berhasil diserap dari program KUR yaitu sebanyak 20.344.639 tenaga kerja.²

Hasil evaluasi dari Bank Dunia dan TNP2K yang berkaitan dengan KUR menjadi suatu pondasi bagi pemerintah dalam upaya perbaikan program KUR yaitu dengan cara peningkatan pendistribusian kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan serta kepada usaha mikro dan kecil agar memiliki efek ganda yang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Daya

Dalam laman resmi kur.ekon.go.id, data realisasi KUR menurut sektor ekonomi pada tahun 2018 dari Januari sampai dengan September 2018 menyebutkan bahwa realisasi KUR pada sektor perdagangan sebesar

53,26%. Sementara itu, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 20,87%. Sedangkan, sektor jasa-jasa sebesar 11,46%, sektor industri pengolahan sebesar 6,33%, dan sisanya yaitu sektor perikanan sebesar 1,42%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor penunjang ketahanan pangan seperti pertanian dan perikanan belum sepenuhnya memanfaatkan program KUR. Masyarakat pada umumnya berdasarkan data tersebut masih memprioritaskan program KUR pada sektor perdagangan dan jasa. Sementara itu, masyarakat belum memanfaatkan program KUR dalam mengembangkan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Padahal sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam masyarakat.

Empat variabel yang dikemukakan oleh George C. Edwards III diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan secara simultan dalam implementasi program KUR. Akan tetapi, masih terdapat satu variabel yang kurang optimal yaitu sumber daya. Sumber daya yang masih kurang dalam program KUR yaitu sumber daya pada sektor pertanian.

²Kur.ekon.go.id. Kebijakan KUR. Diakses pada tanggal 5 Juni 2020, dari <http://www.kur.ekon.go.id/kebijakan-kur>

Dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan program KUR dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan, maka diperlukan adanya suatu rancangan agar masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami program KUR terkait pentingnya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam menunjang terwujudnya ketahanan pangan. Oleh karena itu, selanjutnya akan dibahas mengenai strategi pemberdayaan pertanian masyarakat dengan memanfaatkan program KUR yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga realisasi program KUR pada sektor pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pembahasan terkait pemberdayaan pertanian masyarakat tersebut akan dibahas sesuai dengan teori yang terdapat dalam landasan teori.

B. Pemberdayaan Pertanian Masyarakat Pemberdayaan Pertanian

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan, yaitu pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung Hurairah, (dalam Pusut, 2017:3). Sementara itu, menurut Fahrudin (dalam Pusut, 2017:3) pemberdayaan sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.

Secara lebih luas, pemberdayaan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat yang berarti mengembangkan potensi ekonomi rakyat, harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat (Sedarmayanti dalam Pusut, 2017:4).

Pusut (2017:4), menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang diterapkan dalam pembangunan memusatkan perhatiannya pada masyarakat dalam proses menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi apabila nilai tambah sosial dan budaya masyarakat memiliki kekuatan yang jika diganti dan disalurkan akan berubah menjadi suatu energi besar dalam mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya yang dilakukan guna membantu masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan

kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.³

Dalam menganalisis pemberdayaan, teori yang dapat digunakan yaitu teori analisis SWOT. Teori ini diperkenalkan oleh Rangkuti pada tahun 1997. Rusdarti (dalam Prawoto, 2012:137) menjelaskan bahwa analisis SWOT merupakan suatu identifikasi berbagai faktor secara sistematis yang didasarkan pada logika dengan mengoptimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Prawoto (2012:137) menjelaskan bahwa analisis SWOT atau juga dikenal sebagai analisis situasi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi atau kebijakan pada suatu sektor ekonomi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijaksanaan merupakan unsur yang terdapat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, perencanaan

strategi (*strategic planning*) harus menganalisis faktor-faktor strategis yang dimiliki (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam setiap kondisi yang ada pada saat ini.

Berkaitan dengan pertanian, pemberdayaan yang dilakukan dalam pertanian masyarakat digunakan untuk mengembangkan sikap mental melalui pembentukan sikap mandiri dalam berusaha. P. Zahriyani (dalam Mangowal, 2013:4) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan mendasar yang dihadapi Indonesia di sektor pertanian yaitu minimnya jumlah serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian dibandingkan dengan sektor yang lain. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya fakta yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani Indonesia hidup dalam kemiskinan dan belum mampu meningkatkan taraf hidupnya karena tidak mampu menyerap teknologi baru yang ada. Usaha untuk meningkatkan pemberdayaan bagi petani dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian yaitu dengan memfasilitasi usaha tani melalui adanya pemberian pendidikan formal maupun non formal yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya seperti adanya penyuluhan secara

³ Risky Pusut, Marthen Kimbal, Michael Mamentu. 2017. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona

Selatan Kabupaten Poso. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 2(2) ; 4

berkala. Materi penyuluhan tersebut dapat berupa penerapan teknologi pertanian, optimalisasi penggunaan sumberdaya tani seperti lahan pertanian, air alami, maupun tenaga manusia dan hewan, diversifikasi pertanian, manajemen usaha tani, manajemen pemasaran dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian.

Arah pemberdayaan bagi masyarakat petani perlu dilakukan dengan pentingnya agribisnis. yaitu mengembangkan pertanian dan agroindustri atau industri yang mengolah hasil pertanian dan jasa-jasa yang menunjangnya. Menurut Kepala Badan SDM pertanian (2010), pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui 5 (lima) cara yaitu: (1) Kegiatan agribisnis berorientasi pada pasar (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas); (2) Usaha agribisnis harus menguntungkan dan *comparable* dengan usaha lainnya; (3) Agribisnis merupakan kepercayaan jangka panjang; (4) Kemandirian dan daya saing usaha; (5) Komitmen terhadap kontrak usaha.⁴

Demi mengoptimalkan adanya program KUR khususnya dalam sektor pertanian, maka diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian. Berdasarkan teori dari P. Zahriyani (dalam Mangowal, 2013:4) usaha untuk meningkatkan pemberdayaan

bagi petani dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian yaitu dengan memfasilitasi usaha tani melalui adanya pemberian pendidikan formal maupun non formal yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya seperti adanya penyuluhan secara berkala. Materi penyuluhan tersebut dapat berupa penerapan teknologi pertanian, optimalisasi penggunaan sumberdaya tani seperti lahan pertanian, air alami, diversifikasi pertanian, tenaga manusia dan hewan, manajemen usaha tani, peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, dan manajemen pemasaran.

Pemberdayaan pertanian masyarakat selanjutnya akan dibahas menurut teori analisis SWOT. Analisis SWOT berguna dalam melakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang selama ini terdapat dalam pertanian masyarakat guna mengoptimalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian, program pemberdayaan pertanian dalam program KUR dapat dirumuskan apabila sudah mengetahui apa yang perlu dioptimalkan dan diminimalisir dalam pertanian masyarakat.

1) *Strengths* (kekuatan)

⁴ J Mangowal. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi

Pedesaan Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Governance. 5 (1) ;4-5

Kekuatan yang ada dalam pertanian di Indonesia yaitu Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah. Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang mengalami perkembangan karena sektor pertaniannya. Potensi alam yang melimpah di Indonesia perlu dimanfaatkan secara maksimal.

Adanya potensi alam yang melimpah membuat hasil pertanian di Indonesia dapat dimaksimalkan dengan baik. Dikutip dari laman Akurat.co (25 September 2019), komoditas pertanian Indonesia yang menjadi unggulan dan menjanjikan untuk diekspor serta menambah devisa negara yaitu tembakau, kopi, beras, rempah-rempah, dan buah serta sayuran.

Dalam laman Akurat.co (25 September 2019), dijelaskan bahwa tembakau merupakan suatu hasil pertanian yang diminati dalam pasaran dunia. Tidak hanya sebagai bahan baku rokok, tembakau juga menjadi bahan baku obat flu maupun beberapa jenis parfum. Salah satu daerah penghasil tembakau terbaik di Indonesia yaitu Bojonegoro dengan menghasilkan tembakau jenis Virginia. Amerika Serikat, Rusia, Belgia, Jerman, dan Belgia menjadi sasaran ekspor tembakau Indonesia dengan jumlah terbesar.

Sementara itu, kopi juga menjadi pilihan ekspor hasil pertanian Indonesia.

Dikutip dari laman Akurat.co (25 September 2019), adanya iklim yang mendukung dan banyaknya perkebunan kopi menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Selain itu, kopi Indonesia mempunyai banyak jenis yang diminati pasar diantaranya kopi luwak yang memiliki harga tinggi dan paling diminati. Produksi kopi nasional sebesar 630 ribu ton per tahunnya dengan tujuan ekspor terbesar ke Amerika Serikat, negara-negara ASEAN, Iran, dan negara jazirah Arab.

Berkaitan dengan beras, beras premium menjadi jenis beras yang diekspor oleh Indonesia. Negara yang menjadi konsumen ekspor beras Indonesia yaitu Malaysia, Brunei, Australia, Singapura, Amerika Serikat, dan beberapa negara eropa seperti Italia, Jerman, dan Belgia (Akurat.co, 25 September 2019).

Sementara itu, dikutip dari laman Akurat.co (25 September 2019) jenis rempah-rempah yang diekspor Indonesia yaitu biji pala, lada, dan vanili. Lada menjadi komoditas ekspor terbesar yang termasuk dalam rempah-rempah. Kemudian disusul oleh kayu manis, pala, vanili, dan cengkeh.

Sementara itu, buah dan sayuran menjadi komoditas pertanian dengan ekspor terbanyak di Indonesia. Dikutip dari

Akurat.co (25 September 2019), Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa buah manggis sudah diekspor ke 29 negara. Di sisi lain, pisang menjadi unggulan ekspor ke Cina, Jepang, dan Malaysia. Selain itu, terdapat sekitar 77 jenis sayuran yang diekspor ke Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Belanda. Selain buah dan sayuran, Indonesia juga mengekspor beberapa jenis bunga ke luar negeri dengan bunga Kamboja dan Melati sebagai bunga khas Indonesia yang diekspor.

2) *Weakness* (kelemahan)

Salah satu masalah dalam pertanian Indonesia yaitu sektor pertanian belum berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dikutip dari laman Detik.com (16 Desember 2017), struktur sektor pertanian dalam pertumbuhan nasional sebesar 2,92% di kuartal III-2017. Pengamat ekonomi Aviliani dalam Detik.com menerangkan bahwa rendahnya sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh cara bercocok tanam secara pribadi. Belum dikelompokkannya petani kecil dapat membuat sulitnya pemenuhan permintaan kebutuhan serta besarnya resiko yang akan ditanggung.

Aviliani dalam Detik.com (16 Desember 2017) menjelaskan bahwa petani yang belum terkelompokkan akan membuat sulitnya akses perbankan bagi para petani

karena perbankan tidak akan mengambil risiko melalui penyaluran kredit kepada petani dengan skala kecil dan tidak menentunya pendapatan. Selain itu, Aviliani dalam Kompas.com menyarankan kepada pemerintah untuk menciptakan program kemitraan antara petani dan perusahaan guna mempermudah akses perbankan serta pembuatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan untuk pertanian.

Kelemahan lain dalam pertanian Indonesia yaitu adanya kekurangan lahan yang disebabkan oleh konversi lahan produktif pertanian menjadi non produktif. Dikutip dari laman Tempo.co (10 September 2014) data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa konversi lahan produktif pertanian di Indonesia terjadi rata-rata sekitar 100 ribu hektar per tahun. Sementara itu, pemerintah hanya dapat menciptakan lahan sawah baru sekitar 40 ribu hektar per tahun. Saat ini petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan pertanian seluas 0,3 hektare. Dengan luas lahan yang minim, Suswono dalam Tempo.co berpendapat bahwa tingkat keekonomian petani di Indonesia belum memadai. Guna mencapai tingkat keekonomian yang memadai, setidaknya petani perlu menguasai lebih dari 2 hektare sawah.

3) *Opportunities* (peluang)

Iklm tropis yang ada di Indonesia sangat menunjang berkembangnya pertanian Indonesia. Dikutip dari laman Pioneer.com, iklim tropis mempunyai kelebihan dalam sektor pertanian yaitu iklim tropis hanya mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Kondisi tersebut sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, wilayah Indonesia mendapatkan penyinaran matahari penuh sepanjang tahunnya dan hal tersebut mendukung proses dari budidaya tanaman.

Di sisi lain, komoditas pangan strategis Indonesia seperti ubi, kedelai, padi, jagung, dan kayu mampu tumbuh secara maksimal pada iklim tropis. Komoditas pertanian lain yang dapat berkembang baik di Indonesia yaitu pertanian tropika seperti sayuran, rempah-rempahan, dan sayuran. Kondisi lahan di Indonesia menjadi suatu peluang dalam pengembangan pertanian masyarakat Indonesia karena sebagian tanah di Indonesia merupakan tanah yang subur. Adanya kondisi lahan yang baik mendorong adanya ketersediaan lahan untuk pertanian. Ketersediaan lahan haruslah dimanfaatkan secara optimal dalam produksi pertanian.

Peluang lain dalam pertanian Indonesia yaitu budidaya aneka jenis tanaman dapat dibudidayakan karena jenis tanah Indonesia yang beraneka ragam sehingga dapat

memungkinkan dilakukannya budidaya. Keanekaragaman hayati seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan menjadi suatu faktor yang menunjang sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

4) Threats (ancaman)

Salah satu permasalahan yang menjadi ancaman bagi pertanian Indonesia yaitu masih adanya impor berbagai komoditas pertanian yang dapat melemahkan petani lokal. Dikutip dari laman Liputan6.com (22 September 2017), peneliti Riyanda Barmawi menyatakan bahwa adanya pemberlakuan impor pangan selama satu dasawarsa dianggap melemahkan petani karena dengan adanya impor pangan membuat swasembada pangan tidak terwujud. Kemudian Riyanda menyatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2017, Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas seperti beras, tepung, garam, mentega, kentang, lada, dan telur unggas.

Selanjutnya Riyadi dalam Liputan6.com menerangkan bahwa pemerintah dapat memaksimalkan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dengan tujuan untuk melindungi produk pangan lokal. Kelompok petani dapat memanfaatkan sertifikasi tersebut guna meningkatkan nilai jual produknya. Selain itu,

sertifikasi dapat digunakan untuk melindungi hasil pertanian lokal dari produk impor.

Selain itu, ancaman lain yang melemahkan pertanian Indonesia yaitu kurangnya SDM di sektor pertanian. Dikutip dari laman Beritasatu.com (12 Desember 2019), Chairman Institute for Food and Agriculture Development Studies (IFADS), Iskandar Andi Nuhung menyampaikan bahwa beberapa komitmen yang dapat dilakukan pemerintah dalam pertanian yaitu menyelamatkan lebih banyak lahan pertanian, membuat tanaman menjadi lebih efisien, memberdayakan petani kecil, membantu keanekaragaman hayati untuk berkembang, mendukung keamanan pangan bagi manusia, dan melindungi setiap pekerja. Guna mewujudkan berbagai komitmen tersebut di Indonesia, maka perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya petani dan penyuluh pertanian. Tantangannya yaitu sebagian besar petani Indonesia berusia 45 tahun ke atas atau lebih. Jika tidak ada regenerasi, maka Indonesia akan terancam kekurangan SDM yang bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah dan industri harus mengupayakan agar generasi milenial terjun di sektor pertanian.

Di sisi lain, produktivitas yang rendah, karena kurangnya akses ke teknologi dan informasi pertanian modern, mendorong

sebagian besar petani untuk beralih ke pekerjaan yang lebih cepat menghasilkan.

Sementara itu, Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida Prof Dadang dalam Beritasatu.com (12 Desember 2019) menjelaskan bahwa saat ini masalah hama penyakit menjadi tantangan utama dalam budidaya pertanian jika dibandingkan dengan masalah pupuk dan kesuburan lahan karena perubahan iklim sangatlah mendukung perkembangan hama, patogen, dan gulma berkembang cepat.

Berdasarkan analisis SWOT dalam Pertanian Indonesia yang telah dijelaskan tersebut, maka strategi yang perlu diterapkan guna mendukung pola pemberdayaan pertanian masyarakat yang tepat diterapkan di Indonesia melalui implementasi Program KUR yaitu:

1. Pemberian sosialisasi secara rutin kepada petani tentang pemanfaatan kondisi alam dan luas lahan yang cukup melimpah guna menghasilkan produk pertanian yang berkualitas melalui adanya penyaluran permodalan dalam program KUR (empowering).
2. Menciptakan program kemitraan antara petani dan perusahaan serta pembuatan kelompok tani guna mempermudah akses perbankan serta pembuatan Kredit Usaha Rakyat

- (KUR) yang dikhususkan untuk pertanian (enabling).
3. Pemberian pemberdayaan kepada masyarakat petani melalui peningkatan kualitas produksi komoditas pangan strategis, penggunaan teknologi produksi, dan penerapan aspek lingkungan serta pemanfaatan ketersediaan lahan pertanian melalui permodalan yang diberikan dalam program KUR (empowering).
 4. Meningkatkan daya saing pertanian lokal khususnya produk pertanian yang masih berdaya saing rendah melalui pemberian pelatihan dan pemberdayaan secara berkelanjutan kepada produsen hasil pertanian dengan memanfaatkan permodalan yang diberikan melalui program KUR agar dapat bersaing dengan banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia (empowering).
 5. Mendorong adanya regenerasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam sektor pertanian melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan generasi muda pertanian Indonesia tentang pentingnya pertanian dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui pemanfaatan permodalan yang diberikan melalui program KUR (enabling dan empowering).
 6. Pemberian kemudahan akses kepada petani dalam memperoleh permodalan agar masyarakat petani dapat mengembangkan usaha pertanian dan meningkatkan hasil produksinya (protecting dan enabling).
 7. Pemberian sosialisasi dan pelatihan kepada petani terkait penanganan hama penyakit dalam budidaya pertanian melalui pemanfaatan teknologi pertanian dengan memanfaatkan permodalan dari program KUR (empowering).

C. Ketahanan Pangan Masyarakat

Ketahanan Pangan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 menyebutkan bahwa konsep ketahanan pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari hayati serta air yang diolah maupun yang tidak diolah, digunakan sebagai konsumsi manusia yang berupa makanan dan minuman, diantaranya bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lain yang diperlukan pada proses penyiapan, pengolahan dan atau produksi makanan atau minuman.

Konsep yang menjadi tolak ukur adanya suatu ketahanan pangan menurut Undang-

undang Nomor 7 tahun 1996 yaitu tercukupinya pangan bagi rumah tangga yang dibuktikan dengan tersedianya pangan yang memadai, baik berupa jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Berdasarkan konsep tersebut, terdapat beberapa prinsip yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (Sumardjo dalam Purwaningsih, 2008). Secara ringkas, prinsip yang harus diperhatikan yaitu⁵ : ketersediaan pangan yang berkaitan dengan tercukupinya jumlah pangan, keamanan pangan yang berkaitan dengan kandungan gizi dan standar perdagangan, pemerataan pangan yang berkaitan dengan distribusi pangan, dan keterjangkauan pangan yang berkaitan dengan kemudahan memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

Sebelum menganalisa hubungan antara pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam memberdayakan pertanian masyarakat guna menciptakan adanya ketahanan pangan dari masyarakat, maka perlu dibahas terlebih dahulu implementasi dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah berjalan maupun sedang berjalan di Indonesia.

Konsep yang menjadi tolak ukur adanya suatu ketahanan pangan menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 yaitu tercukupinya pangan bagi rumah tangga yang dibuktikan dengan tersedianya pangan yang memadai, baik berupa jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Secara ringkas, Purwaningsih (2008:2) menerangkan bahwa prinsip yang harus diperhatikan yaitu : ketersediaan pangan yang berkaitan dengan tercukupinya jumlah pangan, keamanan pangan yang berkaitan dengan kandungan gizi dan standar perdagangan, pemerataan pangan yang berkaitan dengan distribusi pangan, dan keterjangkauan pangan yang berkaitan dengan kemudahan memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

Berdasarkan kriteria ketahanan pangan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 dan pendapat dari Purwaningsih (2008:2), dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan dapat dicapai apabila ketersediaan pangan yang merata dan berkualitas terpenuhi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan keamanan pangan, pemerintah dapat memaksimalkan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah

⁵ Yunastiti Purwaningsih. 2008. Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 9(1). 2-3.

(OKKPD) dengan tujuan untuk melindungi produk pangan lokal.

Demi tercapainya ketahanan pangan dalam masyarakat menggunakan adanya pemberdayaan pertanian masyarakat melalui program KUR dapat tercapai melalui penerapan strategi-strategi yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya. Adanya penerapan strategi tersebut dalam pemberdayaan pertanian masyarakat melalui program KUR, maka diharapkan masyarakat petani dapat mandiri dalam mengembangkan hasil produksi pertanian.

Petani yang dapat memanfaatkan dengan baik permodalan yang diberikan melalui program KUR akan membuat produksi hasil pertaniannya dapat berkembang dengan optimal. Apabila setiap masyarakat petani di Indonesia mampu mengembangkan produksi hasil pertaniannya dengan optimal, maka pasokan bahan pangan yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi.

Berkembangnya pertanian masyarakat yang dapat mengembangkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi melalui pemberdayaan dalam program KUR akan membuat ketersediaan pangan masyarakat Indonesia menjadi tercukupi serta pemerataan pangan dapat tercapai. Dengan begitu, ketahanan pangan dapat dicapai melalui pemberdayaan pertanian masyarakat dengan

cara implementasi program KUR yang menggunakan strategi secara efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan hasil produksi pertanian.

4. SIMPULAN

A. Kesimpulan

Empat variabel yang dikemukakan oleh George C. Edwards III sudah dilaksanakan secara simultan dalam implementasi program KUR. Akan tetapi, masih terdapat satu variabel yang kurang optimal yaitu sumberdaya. Sumberdaya yang masih kurang dalam program KUR yaitu sumberdaya pada sektor pertanian.

Analisis pertanian Indonesia dilakukan melalui analisis SWOT. Strategi pola pemberdayaan pertanian masyarakat yang dapat diterapkan berdasarkan analisis SWOT melalui implementasi program KUR yaitu:

1. Pemberian sosialisasi secara rutin kepada petani tentang pemanfaatan kondisi alam dan luas lahan yang cukup melimpah guna menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, pentingnya pertanian dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui pemanfaatan permodalan yang diberikan melalui program KUR, dan penanganan hama penyakit dalam budidaya pertanian melalui pemanfaatan teknologi pertanian.

2. Menciptakan program kemitraan antara petani dan perusahaan serta pembuatan kelompok tani guna mempermudah akses perbankan serta pembuatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan untuk pertanian.
3. Meningkatkan daya saing pertanian lokal khususnya produk pertanian yang masih berdaya saing rendah melalui pemberian pelatihan dan pemberdayaan secara berkelanjutan kepada produsen hasil pertanian melalui program KUR agar dapat bersaing dengan banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia.

Berkembangnya pertanian masyarakat yang dapat mengembangkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi melalui pemberdayaan pertanian dalam program KUR yang menggunakan strategi secara efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan hasil produksi pertanian akan membuat ketersediaan pangan masyarakat Indonesia menjadi tercukupi serta pemerataan pangan dapat tercapai sehingga ketahanan pangan dapat dicapai.

B. Saran

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama dengan baik dalam mensukseskan adanya implementasi program KUR di Indonesia khususnya dalam sektor pertanian masyarakat. Pemerintah perlu

menerapkan strategi yang tepat dalam memberdayakan pertanian masyarakat melalui program KUR. Sosialisasi dan pelatihan secara rutin tentang pentingnya hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan perlu dilakukan dalam pemberdayaan pertanian oleh pemerintah agar masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan dalam sektor pertanian. Masyarakat petani diharapkan mampu menjadi mandiri dalam mengembangkan hasil produksi pertaniannya dengan memanfaatkan permodalan yang diberikan melalui program KUR.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajani, Mgbenka, Onah, O. (2015). Empowerment of Youths in Rural Areas through Agricultural Development Programmes: Implications for Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of Research in Agriculture and Forestry*, 2(2), 34–41. Retrieved from <http://www.ijraf.org/pdf/v2-i2/5.pdf>
- [2] Akurat.co. (2019, 25 September). 5 Komoditas Pertanian yang Selalu Jadi Unggulan Indonesia. Diakses pada tanggal 19 Juni 2020, dari <https://www.google.com/amp/s/m.akurat.co/778822/5-komoditas-pertanian-yang-selalu-jadi-unggulan-indonesia>
- [3] Anggara, Sahya, Li Sumantri. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung : Pustaka Setia.
- [4] Beritasatu.com. (2019, 12 Desember). Indonesia Terancam Kekurangan SDM di Sektor Pertanian. Diakses tanggal 20 Juni 2020, dari <https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/nasional/590379-indonesia-terancam-kekurangan-sdm-di-sektor-pertanian>
- [5] Detik.com. (2017, 16 Desember). Ini Penyebab Kontribusi Pertanian Ke Ekonomi RI Masih Rendah. Diakses tanggal 19 Juni 2020, dari <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3772980/ini-penyebab-kontribusi-pertanian-ke-ekonomi-ri-masih-rendah>

- [6] Hardiyanti, Abd Kadir Adys, Sudarmi. 2019. Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*. 5(2). 213-215.
- [7] Harimurti, S., & Erwandri, E. (2021). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BERWIRUSAHA PRODUK HASIL PERTANIAN DI MASA PANDEMI COVID 19 Pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia sejak awal maret 2020 , mengakibatkan beberapa aktivitas usaha tertangguhkan , terjadi PHK secara masal , pendapatan masya*. 2(2), 200–204.
- [8] J Mangowal. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*. 5 (1) ;4-5
- [9] Kur.ekon.go.id. Kebijakan KUR. Diakses pada tanggal 5 Juni 2020, dari <http://www.kur.ekon.go.id/kebijakan-kur>
- [10] Liputan6.com. (2017, 22 September). Impor Pangan Lemahkan Daya Saing Petani Lokal. Diakses pada tanggal 19 Juni 2020, dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3103464/impor-pangan-lemahkan-daya-saing-petani-lokal>
- [11] Nano Prawoto. (2012). Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Volume 8, Nomor 2.137
- [12] Pioneer.com. Potensi Alam Yang Menjadi Keunggulan Pertanian Indonesia. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020, dari <https://www.pioneer.com/web/site/indonesia/Potensi-Alam-yang-Menjadi-Keunggulan-Pertanian-Indonesia>
- [13] Purwaningsih, Yunastiti. 2008. Ketahanan Pangan : Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 9(1). 2-3.
- [14] Puryanto, Novi Helmidani. (2019). Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 1, No.4 ;73
- [15] Risky Pusut, Marthen Kimbal. 2017. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 2(2) ; 3-4
- [16] Suryanti, S., Umami, A., Firmansyah, R., & Widyasaputra, R. (2020). Pemberdayaan Pertanian Organik Dengan Model Hidrokanik Budikdamber Di Era Pandemi Covid – 19 Di Kabupaten Bantul Provinsi Diy. *Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat*, 1(2), 1–6.
- [17] Tempo.co. (2014, 10 September). Menteri Pertanian: Kekurangan Pangan Depan Mata. Diakses tanggal 20 Juni 2020, dari <https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/605950/menteri-pertanian-kekurangan-pangan-di-depan-mata>

